

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA I**

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029



**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA I**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu wujud komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

Substansi Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Tahun 2025–2029 merupakan penjenjangan dari Rencana Strategis di masing-masing Unit Organisasi yang merupakan penurunan dari Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Rencana Strategis, atau yang dikenal sebagai Renstra, memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, program, serta kegiatan prioritas yang disusun secara sistematis dan terukur guna mendukung pencapaian target pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman.

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari tahapan pembangunan nasional yang menjadi landasan pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan hunian layak serta terjangkau, serta kawasan yang aman, inklusif, produktif, dan tangguh.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I secara terintegrasi dan multisektor, dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Selain itu, Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam perencanaan kinerja, pengukuran capaian, pelaporan, serta evaluasi kinerja, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua dalam mewujudkan target dan sasaran Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Tahun 2025–2029.



Jakarta, 13 Februari 2026
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Jawa I

Elias Wijaya Panggabean, S.T., M.T.
NIP. 19780828 200502 1 002

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	10
1.2.1 Potensi	10
1.2.2 Permasalahan	11
1.2.3 Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal	12
1.2.3.1 Analisis Faktor Internal: Kekuatan dan Kelemahan	12
1.2.3.2 Analisis Faktor Eksternal: Peluang dan Ancaman	13
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN	15
2.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I	15
2.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I	16
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	18
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi	18
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	18
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	18
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	19
3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR)	20
3.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal	20
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I	20
3.3 Kerangka Kelembagaan	21
3.3.1 Tujuan Pembentukan BP3KP Jawa I	22
3.3.2 Tugas dan Fungsi BP3KP Jawa I	22
3.3.3 Struktur Organisasi	23
3.3.4 Struktur Koordinasi BP3KP	24
3.3.5 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	25
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
4.1. Target Kinerja	28
4.2. Kerangka Pendanaan	29
BAB V. PENUTUP	30
LAMPIRAN	32
Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai P3KP Jawa I	32
Lampiran 2 Pohon Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pohon Kinerja Program Dukungan Manajemen	39
Lampiran 3. Metode Perhitungan Balai P3KP Jawa I	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DK Jakarta	3
Tabel 1. 2 Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi Banten.....	4
Tabel 1. 3 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi DK Jakarta Tahun 2024	4
Tabel 1. 4 Data <i>Backlog</i> Perumahan Provinsi DK Jakarta	5
Tabel 1. 5 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Banten Tahun 2024	6
Tabel 1. 6 Data <i>Backlog</i> Perumahan Provinsi Banten.....	6
Tabel 1. 7 Perbandingan Target, Capaian dan Kinerja Tahun 2021 - 2024.....	8
Tabel 2. 1 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan BP3KP Jawa I	16
Tabel 4. 1 Target Kinerja Kegiatan BP3KP Jawa I.....	28
Tabel 4. 2 Kebutuhan Pendanaan Bersumber APBN Kegiatan BP3KP Jawa I Tahun 2025- 2029	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Administratif Provinsi DK Jakarta	2
Gambar 1. 2 Peta Wilayah Administratif Provinsi Banten	3
Gambar 2. 1 Pohon Kinerja Sasaran Program BP3KP Jawa I.....	17
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BP3KP Jawa I.....	24
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi BP3KP	24
Gambar 3. 3 Struktur Koordinasi BP3KP.....	25
Gambar 3. 4 Peta Jabatan BP3KP Jawa I.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selanjutnya, dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Sebagai hak dasar yang fundamental dan menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk hidup secara bermartabat, damai, aman, dan nyaman, pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau juga telah menjadi komitmen global sebagaimana tertuang dalam Agenda Habitat (*The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements*) dan *Millennium Development Goals* (MDGs). Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungan hidupnya.

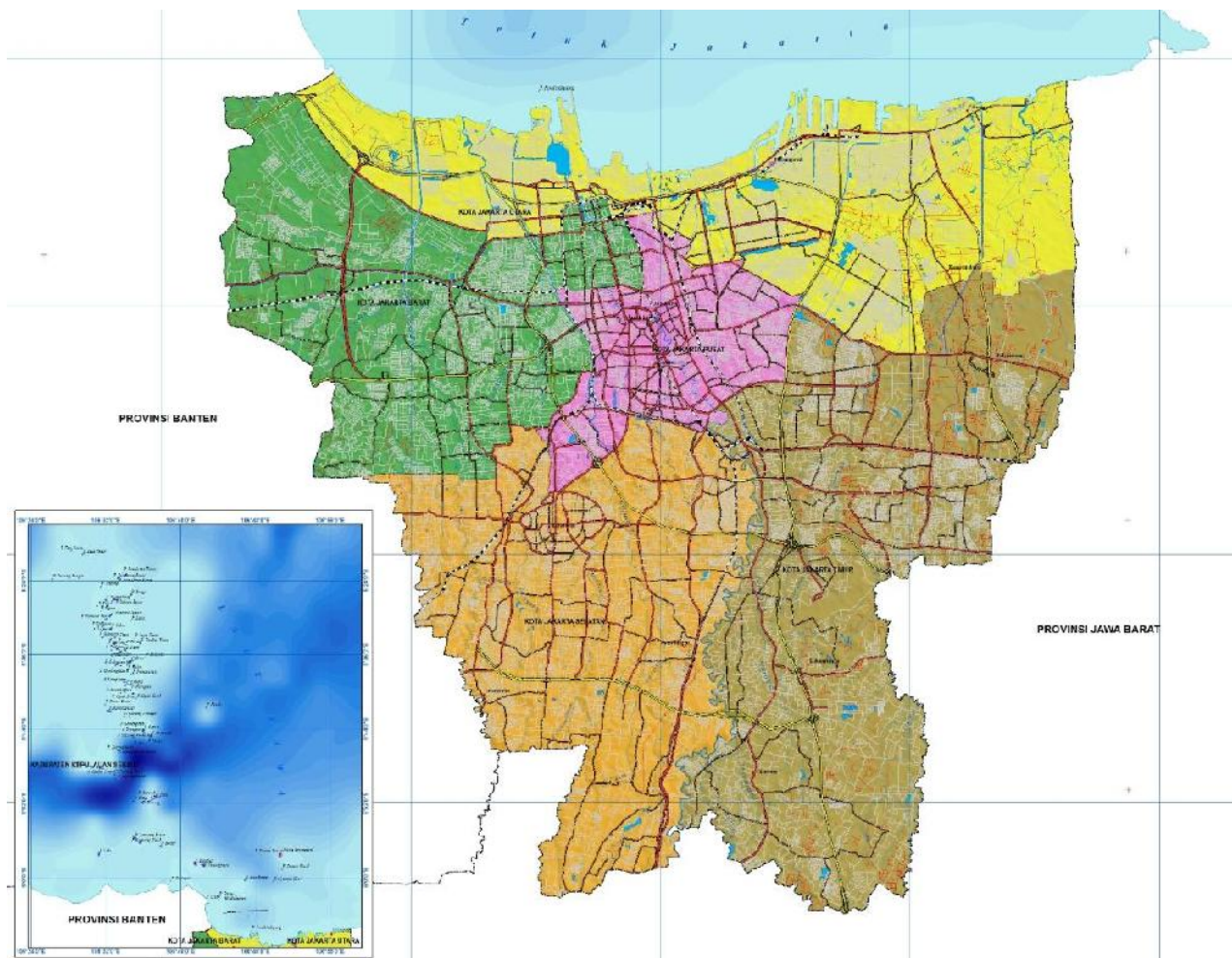
Sejalan dengan amanat tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 menetapkan arah pembangunan perumahan dan permukiman menuju terpenuhinya rumah layak huni dan terjangkau yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan yang memadai serta sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, serta berkewajiban menjaga dan memelihara prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman. Dalam konteks tersebut, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sarana pembinaan keluarga, peningkatan kualitas hidup, serta modal sosial dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan amanat tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan strategis dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian ini bertanggung jawab dalam mendorong penyediaan hunian layak, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, serta penguatan sistem pembiayaan perumahan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat wilayah, dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP). BP3KP Jawa I merupakan UPT di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibina oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, serta berkoordinasi dengan unit organisasi terkait lainnya. Keberadaan BP3KP Jawa I berperan penting dalam pelaksanaan program, fasilitasi teknis, pendampingan, serta pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja BP3KP Jawa I meliputi Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten, yang memiliki karakteristik geografis, kependudukan, dan sosial ekonomi yang berbeda. Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan wilayah metropolitan dengan tingkat

kepadatan penduduk yang tinggi serta keterbatasan lahan, yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kota dan Kabupaten Bekasi di sebelah timur, serta Kota Depok di sebelah selatan. Kondisi tersebut menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan permukiman dengan tekanan kebutuhan hunian yang sangat tinggi.



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Administratif Provinsi DK Jakarta

Sementara itu, Provinsi Banten memiliki karakteristik wilayah yang lebih beragam, meliputi kawasan pesisir, perkotaan, perdesaan, dan kawasan industri, dengan batas wilayah Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, serta Samudra Hindia di selatan. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan permukiman yang relatif lebih luas, khususnya di wilayah kabupaten, namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar di beberapa kawasan.

Tabel 1. 2 Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/ Kota Administrasi	Ibu Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (2024)
1	Kabupaten Lebak	Rangkasbitung	3.312,18	1.506.378
2	Kabupaten Pandeglang	Pandeglang	2.771,41	1.413.897
3	Kabupaten Serang	Ciruas	1.469,66	1.756.816
4	Kabupaten Tangerang	Tigaraksa	1.027,76	3.373.149
5	Kota Cilegon	-	162,51	476.867
6	Kota Serang	-	265,79	743.748
7	Kota Tangerang	-	178,35	1.927.815
8	Kota Tangerang Selatan	-	164,86	1.429.529

Sebaliknya, Provinsi Banten memiliki luas wilayah yang relatif lebih besar dengan sebaran penduduk yang lebih bervariasi. Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, serta wilayah perkotaan di sekitarnya berkembang pesat sebagai kawasan permukiman penyangga Jakarta, sedangkan wilayah selatan Banten masih didominasi kawasan perdesaan. Kondisi ini memberikan peluang pengembangan perumahan tapak, namun tetap memerlukan dukungan infrastruktur dan pengendalian pertumbuhan kawasan agar pembangunan permukiman berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

Dari aspek kependudukan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2024, jumlah keluarga di Provinsi Daerah Khusus Jakarta tercatat sebesar 3.617.684 kepala keluarga, sedangkan di Provinsi Banten mencapai 4.120.486 kepala keluarga. Tingginya jumlah keluarga tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kebutuhan hunian, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Kondisi sosial ekonomi rumah tangga turut memengaruhi pola kepemilikan dan kualitas hunian. Rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap rumah milik sendiri dengan kualitas bangunan yang layak. Sebaliknya, rumah tangga berpendapatan rendah, termasuk kelompok miskin dan rentan, lebih banyak menempati hunian dengan status kontrak, bebas sewa, atau bangunan dengan kualitas terbatas. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan, khususnya di kawasan perkotaan.

Tabel 1. 3 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas/Lainnya	Jumlah
1	Kepulauan Seribu	80,52	5,40	13,85	NA	100,00
2	Jakarta Selatan	54,49	22,10	22,77	0,64	100,00
3	Jakarta Timur	53,05	23,32	20,62	3,01	100,00
4	Jakarta Pusat	40,39	13,98	45,04	0,60	100,00
5	Jakarta Barat	60,10	19,40	20,37	NA	100,00

6	Jakarta Utara	55,19	23,84	20,21	NA	100,00
DK Jakarta		54,44	21,30	23,08	1,18	100,00

Sumber : Susenas 2024

Berdasarkan data Susenas Tahun 2024, kondisi perumahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga menempati rumah milik sendiri sebesar 54,44 persen, sementara 21,30 persen menempati rumah kontrak/sewa, dan 23,08 persen menempati rumah bebas sewa. Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki proporsi kepemilikan rumah tertinggi, yaitu 80,52 persen. Di wilayah administrasi kota, variasi status kepemilikan cukup signifikan, yang mencerminkan tingginya mobilitas penduduk dan keterbatasan akses kepemilikan hunian di pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan.

Kondisi perumahan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tingginya kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau, dengan keterbatasan lahan, masih menjadi tantangan dalam pembangunan perumahan. Berikut ini merupakan data *backlog* perumahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta:

Tabel 1. 4 Data *Backlog* Perumahan Provinsi DK Jakarta

No.	Kabupaten/ Kota	<i>Backlog</i> Kepemilikan	<i>Backlog</i> Kualitas	Total <i>Backlog</i> Perumahan
1	Kabupaten Kepulauan Seribu	1.679	1.419	3.098
2	Kota Jakarta Selatan	120.713	27.940	148.653
3	Kota Jakarta Timur	219.898	53.345	273.243
4	Kota Jakarta Pusat	94.878	31.456	126.334
5	Kota Jakarta Barat	156.301	50.620	206.921
6	Kota Jakarta Utara	144.957	44.233	189.190
Total		738.426	209.013	947.439

sumber <https://my.pkp.go.id/> dan <https://dtsen.data.go.id/>

Dari sisi kebutuhan hunian, Provinsi Daerah Khusus Jakarta masih menghadapi permasalahan *backlog* perumahan. Berdasarkan Susenas BPS Tahun 2024, jumlah keluarga mencapai 3.617.684 KK, dengan *backlog* kepemilikan rumah sebesar 738.426 rumah tangga dan *backlog* rumah tidak layak huni sebesar 209.013 rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan perumahan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan, tetapi juga peningkatan kualitas hunian yang aman, sehat, dan layak.

Sedangkan di Provinsi Banten, dinamika perkembangan wilayah, urbanisasi, serta pertumbuhan kawasan industri turut memengaruhi kondisi perumahan. Perkembangan tersebut berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap kebutuhan hunian, terutama di wilayah dengan fungsi ekonomi dan industri yang berkembang pesat. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Banten, sebagaimana tercermin pada data status kepemilikan bangunan tempat tinggal rumah tangga yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 5 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Banten Tahun 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas/Lainnya	Jumlah
1	Kabupaten Pandeglang	93,91	1,35	4,67	NA	100,00
2	Kabupaten Lebak	93,73	NA	5,75	NA	100,00
3	Kabupaten Tangerang	91,06	3,28	5,66	-	100,00
4	Kabupaten Serang	92,34	0,34	7,32	-	100,00
5	Kota Tangerang	70,41	15,43	12,86	1,30	100,00
6	Kota Cilegon	82,38	7,81	8,34	1,48	100,00
7	Kota Serang	89,86	3,35	6,78	-	100,00
8	Kota Tangerang Selatan	83,31	12,32	3,65	0,72	100,00
Banten		86,49	6,17	6,94	0,41	100,00

Sumber : Susenas 2024

Berdasarkan data Susenas Tahun 2024, mayoritas rumah tangga di Provinsi Banten telah menempati rumah milik sendiri dengan persentase sebesar 86,49 persen. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki tingkat kepemilikan tertinggi, sedangkan wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menunjukkan tingkat kepemilikan yang lebih rendah. Variasi tersebut mencerminkan perbedaan karakteristik sosial ekonomi, tingkat urbanisasi, dan akses terhadap hunian layak.

Tabel 1. 6 Data *Backlog* Perumahan Provinsi Banten

No.	Kabupaten/ Kota	<i>Backlog</i> Kepemilikan	<i>Backlog</i> Kualitas	Total <i>Backlog</i> Perumahan
1	Kabupaten Pandeglang	55.317	216.908	272.225
2	Kabupaten Lebak	49.001	172.734	221.735
3	Kabupaten Tangerang	131.858	154.249	286.107
4	Kabupaten Serang	73.712	82.079	155.791
5	Kota Tangerang	96.786	59.513	156.299
6	Kota Cilegon	21.883	6.516	28.399
7	Kota Serang	30.393	16.469	46.862
8	Kota Tangerang Selatan	34.104	23.402	57.506
Total		493.054	731.870	1.224.924

sumber <https://my.pkp.go.id/> dan <https://dsen.data.go.id/>

Jumlah keluarga tercatat di Provinsi Banten mencapai 4.120.486 KK dengan *backlog* perumahan sebesar 493.054 rumah tangga, serta *backlog* rumah tidak layak huni sebesar 731.870 rumah tangga. Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan *backlog* terbesar, yang menunjukkan masih

terbatasnya akses masyarakat terhadap hunian layak dan infrastruktur permukiman yang memadai.

Dalam hal penyediaan perumahan, hunian vertikal berupa rumah susun sederhana milik dan rumah susun sederhana sewa telah berkembang di beberapa wilayah perkotaan, khususnya di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Hunian ini menjadi alternatif utama dalam mengatasi keterbatasan lahan serta menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok pekerja.

Selain itu, pengembangan kawasan hunian juga mulai diarahkan pada wilayah yang terlayani transportasi massal, guna meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi mobilitas masyarakat. Namun, penerapan konsep hunian terintegrasi tersebut masih terbatas pada kawasan tertentu dan belum merata di seluruh wilayah kerja BP3KP Jawa I.

Dari aspek pembiayaan, masyarakat mengakses perumahan melalui berbagai skema, antara lain tabungan perumahan rakyat (Tapera), fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), serta kredit pemilikan rumah (KPR). Meskipun demikian, keterbatasan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor informal masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan keterjangkauan hunian.

Di sisi lain, keswadayaan masyarakat masih berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan hunian, terutama di wilayah perdesaan dan permukiman informal. Bentuk keswadayaan tersebut antara lain pembangunan rumah secara bertahap, swadaya kelompok, serta pemanfaatan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Namun, keterbatasan kemampuan teknis dan finansial sering berdampak pada rendahnya kualitas bangunan.

Wilayah Jakarta dan Banten juga memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana, khususnya banjir, banjir rob, dan genangan. Sejumlah kawasan permukiman berada di wilayah dataran rendah, daerah aliran sungai, dan kawasan pesisir, sehingga memerlukan penanganan khusus dalam perencanaan dan pembangunan perumahan.

Dari aspek tata kelola, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman masih menghadapi tantangan dalam koordinasi lintas sektor, ketersediaan data terintegrasi, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Sistem informasi perumahan dan permukiman belum sepenuhnya terintegrasi secara spasial dan sosial ekonomi, sehingga memengaruhi ketepatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.

Secara keseluruhan, kondisi umum perumahan di wilayah kerja BP3KP Jawa I menunjukkan perbedaan karakteristik antara Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten. Di Jakarta, keterbatasan lahan, kepadatan penduduk, dan tingginya harga tanah mendorong kebutuhan hunian vertikal dan peningkatan akses pembiayaan. Sementara itu, di Banten, ketersediaan lahan relatif lebih memadai, namun permasalahan kualitas hunian dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi isu utama. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam perumusan strategi, pemanfaatan potensi, serta penanganan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Tabel 1. 7 Perbandingan Target, Capaian dan Kinerja Tahun 2021 - 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target, Capaian dan Kinerja Tahun 2021 - 2024											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	5	5	100	5	5	100	5	5	100	3	3	100
	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	3775	2775	60.26	3775	2775	60.26	3477	3457	99.42	2434	2434	100
	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	306	306	100	306	306	100	238	238	100	53	53	100
	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	10	10	100	10	10	100	4	4	100	12	12	100
	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	1	1	100	1	1	100	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	52	52	100	52	52	100	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun	Unit	830	830	100	830	830	100	2836	3545	125	1598	1598	100
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Laporan	-	-	-	-	-	-	2	2	100	3	3	100

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target, Capaian dan Kinerja Tahun 2021 - 2024											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	3	3	100	3	3	100	1	1	100	1	1	100
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100
	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100

Berdasarkan tabel perbandingan target Renstra Tahun 2021 – 2024 dengan capaian program tahun 2021 – 2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I secara keseluruhan hampir mencapai target dalam Renstra sesuai tabel diatas.

1.2 Potensi Dan Permasalahan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran strategis sebagai regulator, operator, dan fasilitator dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Sebagai regulator, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sebagai operator, Kementerian mendorong terbentuknya ekosistem perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui pendekatan gotong - royong, dengan menitikberatkan pada pengaturan sistem, pembukaan akses, dan penguatan peran para pelaku, serta mendorong inovasi, tidak semata-mata berfokus pada pembangunan fisik rumah oleh negara. Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga bertindak sebagai fasilitator melalui penguatan koordinasi lintas sektor, dukungan kepada pemerintah daerah, serta pelibatan dunia usaha, BUMN/BUMD, dan masyarakat.

1.2.1 Potensi

Potensi merupakan faktor yang mendukung balai dalam melaksanakan peran strategisnya sebagai pelaksana penyediaan perumahan, peningkatan kualitas hunian, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan pascabencana, serta fasilitasi serah terima aset sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025. Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan spasial yang memberikan peluang dalam pengembangan sektor perumahan dan permukiman, antara lain:

1. Tingginya kebutuhan hunian perkotaan
Pertumbuhan penduduk dan jumlah rumah tangga di Jakarta dan Banten, sebagaimana tercermin dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, mendorong meningkatnya permintaan terhadap hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok pekerja sektor informal.
2. Perkembangan hunian vertikal terjangkau
Keterbatasan ruang perkotaan mendorong berkembangnya rumah susun sederhana milik dan rumah susun sederhana sewa sebagai alternatif penyediaan hunian, khususnya di wilayah Jakarta dan kawasan perbatasan Banten.
3. Peluang integrasi hunian dengan transportasi massal
Pengembangan kawasan di sekitar simpul transportasi umum massal membuka peluang penerapan konsep pengembangan berorientasi transit (*Transit Oriented Development/TOD*) sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas hunian bagi masyarakat.
4. Potensi pemanfaatan aset dan lahan milik negara/daerah
Keberadaan aset dan lahan milik pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan perumahan melalui skema kerja sama pemanfaatan lahan.
5. Ketersediaan skema pembiayaan perumahan nasional
Tersedianya berbagai skema pembiayaan, seperti tabungan perumahan rakyat (Tapera), fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), surat berharga syariah negara (SBSN), kredit pemilikan rumah (KPR), serta pembiayaan mikro, menjadi peluang dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian.
6. Praktik keswadayaan dan pemberdayaan masyarakat

Di sejumlah kawasan permukiman, masih berkembang praktik pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya melalui gotong royong dan program bantuan stimulan, yang mencerminkan potensi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas hunian.

7. Peluang kerja sama pemerintah dan badan usaha

Kebutuhan investasi yang besar dalam sektor perumahan membuka peluang pengembangan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), khususnya pada proyek perumahan skala kawasan dan penataan permukiman kumuh.

8. Meningkatnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat semakin berkembang dalam mendukung program perumahan dan penataan kawasan permukiman.

Dengan memanfaatkan potensi tersebut secara terintegrasi melalui penguatan kelembagaan, optimalisasi pembiayaan, serta kerja sama lintas sektor, pembangunan perumahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten dapat diarahkan untuk menjawab permasalahan *backlog*, kualitas hunian, dan keterjangkauan secara berkelanjutan.

1.2.2 Permasalahan

Permasalahan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Balai masih ditandai oleh keterbatasan akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau, serta belum meratanya kualitas lingkungan permukiman. Berdasarkan kondisi umum dan data kependudukan, permasalahan perumahan tidak hanya berkaitan dengan kuantitas hunian, tetapi juga mencakup aspek kualitas bangunan, kepastian hukum lahan, ketersediaan infrastruktur dasar, dan keterjangkauan pembiayaan. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan lahan perkotaan

Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU), terutama di wilayah inti perkotaan, belum sepenuhnya diimbangi dengan data tata guna lahan yang mutakhir dan terintegrasi.

2. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi

Laju pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi menuju kawasan metropolitan Jakarta–Banten tidak seimbang dengan kapasitas penyediaan hunian formal.

3. Tingginya *backlog* perumahan

Masih tingginya *backlog* kepemilikan dan kepenghunian rumah, baik di Jakarta maupun Banten, menunjukkan keterbatasan akses masyarakat terhadap hunian permanen.

4. Masih banyaknya rumah tidak layak huni

Di sejumlah kawasan, terutama permukiman padat dan wilayah pinggiran, masih ditemukan rumah dengan kualitas bangunan, sanitasi, dan infrastruktur dasar yang belum memenuhi standar.

5. Ketidaktepatan sasaran bantuan perumahan

Pelaksanaan program bantuan perumahan belum sepenuhnya tepat sasaran, serta masih ditemukan hasil pembangunan yang tidak konsisten dengan standar teknis.

6. Permasalahan legalitas lahan dan bangunan

Masih banyak rumah yang berdiri di atas tanah dengan status hukum belum jelas atau belum memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap.

7. Lemahnya perlindungan konsumen perumahan

Perlindungan terhadap konsumen masih terbatas, terutama terkait mutu bangunan, legalitas, dan pemenuhan PSU.

8. Keterbatasan kualitas sanitasi dan infrastruktur lingkungan

Di sejumlah kawasan permukiman, kualitas drainase, air bersih, pengelolaan limbah, dan sanitasi masih berada di bawah standar pelayanan minimal.

9. Belum optimalnya sistem data perumahan

Basis data perumahan dan permukiman yang belum terintegrasi, mutakhir, dan berbasis spasial melemahkan proses perencanaan dan pengendalian program.

10. Kendala dalam serah terima aset

Kendala administrasi, fragmentasi data, dan rendahnya komitmen penerima hibah menghambat penyelesaian proses serah terima aset.

11. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan daerah

Pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan fiskal dan kapasitas teknis, sehingga relatif bergantung pada dukungan pendanaan APBN.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan penyelenggaraan perumahan di wilayah kerja balai bersifat kompleks dan saling berkaitan, mencakup aspek tata ruang, sosial, ekonomi, hukum, serta kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terpadu, berbasis data yang akurat, dan berfokus pada peningkatan kualitas hunian serta keberlanjutan pembangunan kawasan permukiman.

1.2.3 Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Analisis faktor internal dan eksternal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang berasal dari internal organisasi, serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang bersumber dari lingkungan eksternal. Analisis ini menjadi dasar dalam perumusan strategi yang adaptif, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten.

1.2.3.1 Analisis Faktor Internal: Kekuatan dan Kelemahan

1. Kekuatan (*Strengths*)

No.	Kekuatan Internal (S)	Relevansi Terhadap Tugas dan Fungsi
S1	Kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah	Mendukung sinkronisasi program perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota
S2	Sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman	Mendukung pelaksanaan program peningkatan kualitas hunian dan penanganan <i>backlog</i>
S3	Pemanfaatan teknologi informasi dan GIS	Mendukung pemetaan kawasan kumuh, <i>backlog</i> , dan wilayah rawan bencana secara spasial
S4	Pengalaman dalam pengelolaan bantuan perumahan	Mendukung efektivitas program bantuan stimulan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
S5	Jaringan kerja dengan lembaga keuangan dan mitra pembangunan	Memperkuat akses pembiayaan dan kolaborasi program perumahan

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

No.	Kelemahan Internal (W)	Relevansi Terhadap Permasalahan
W1	Ketergantungan pada anggaran APBN	Rentan terhadap penyesuaian kebijakan fiskal dan efisiensi anggaran
W2	Keterbatasan basis data terpadu	Menyulitkan verifikasi sasaran masyarakat berpenghasilan rendah
W3	Pengawasan mutu konstruksi belum optimal	Berpengaruh terhadap kualitas hasil pembangunan perumahan
W4	Keterbatasan SDM teknis bersertifikasi	Membatasi kapasitas pengendalian mutu dan pengawasan lapangan
W5	Sistem monitoring dan evaluasi belum terintegrasi penuh	Menghambat pengukuran capaian program secara komprehensif

1.2.3.2 Analisis Faktor Eksternal: Peluang dan Ancaman

1. Peluang (*Opportunities*)

No.	Peluang Eksternal (O)	Dukungan Sumber
O1	Program nasional percepatan perumahan	Program 3 Juta Rumah dan kebijakan peningkatan kualitas hunian
O2	Revitalisasi kawasan padat dan kumuh	Dukungan pemerintah daerah dalam penataan kawasan perkotaan
O3	Pengembangan pembiayaan hijau	Dukungan perbankan dan skema KPR ramah lingkungan
O4	Penguatan sistem kota pintar (smart city)	Pengembangan smart housing, digitalisasi layanan, dan TOD
O5	Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha	Dukungan investasi swasta dan KPBU sektor perumahan
O6	Dukungan lembaga pembiayaan perumahan	Tapera, FLPP, KPR subsidi, dan pembiayaan mikro

2. Ancaman (*Threats*)

No.	Ancaman Eksternal (T)	Sumber
T1	Degradasi lingkungan akibat pembangunan	Alih fungsi lahan, kepadatan kawasan, dan pencemaran
T2	Tumpang tindih regulasi	Ketidaksinkronan kebijakan tata ruang dan perumahan
T3	Kenaikan harga material konstruksi	Inflasi dan ketergantungan bahan impor
T4	Dampak perubahan iklim dan risiko bencana	Banjir, banjir rob, longsor, dan kenaikan muka air laut

T5	Tekanan urbanisasi dan pertumbuhan kawasan informal	Munculnya permukiman tidak terencana
T6	Fluktuasi kebijakan fiskal nasional	Berpengaruh terhadap kesinambungan pendanaan

Analisis faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa BP3KP Jawa I memiliki dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, dan jejaring kerja yang cukup kuat, namun masih menghadapi keterbatasan data, pendanaan, dan pengawasan. Peluang berupa dukungan kebijakan, pembiayaan, dan kolaborasi lintas sektor perlu dioptimalkan untuk menjawab *backlog*, keterbatasan lahan di Jakarta, serta permasalahan kualitas hunian di Banten. Sementara itu, berbagai risiko lingkungan, ketidaksinkronan regulasi, dan tekanan urbanisasi perlu dikelola melalui perencanaan berbasis data dan penguatan koordinasi. Oleh karena itu, analisis ini menjadi dasar penyusunan strategi BP3KP Jawa I yang adaptif, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada periode 2025–2029 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pembangunan perumahan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup, penguatan ketahanan sosial, serta pemerataan pembangunan wilayah secara berimbang.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas program, serta mewujudkan ekosistem perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian melalui penyediaan rumah baru serta peningkatan kualitas rumah eksisting, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan peran tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika pertumbuhan rumah tangga, urbanisasi, serta perkembangan wilayah.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dilaksanakan secara terpadu dengan penataan kawasan permukiman, pengurangan kawasan kumuh, pengembangan wilayah perdesaan, serta penguatan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh.

Sejalan dengan peran dan fungsi tersebut, diperlukan arah dan tujuan yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan BP3KP Jawa I. Tujuan ini menjadi landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, termasuk penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu, melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas hunian, fasilitasi pembiayaan perumahan, serta penyelenggaraan perumahan yang kolaboratif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Meningkatkan kualitas tata kelola dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
3. Meningkatkan mutu tata kelola dan manajemen yang profesional dan efektif.

2.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I

Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan balai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerja. Sasaran program ini menjadi pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan kementerian secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Berikut adalah Sasaran Program BP3KP Jawa I sebagai wujud pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja:

1. **Meningkatnya hunian layak**, yang dijabarkan melalui kegiatan penyelenggaraan sistem dan strategi, penyiapan lahan serta prasarana, sarana dan utilitas umum, penyediaan hunian layak huni, serta penyelenggaraan pembiayaan perumahan.
2. **Meningkatnya penanganan permukiman kumuh**, yang dilaksanakan melalui kegiatan penanganan permukiman kumuh secara terpadu.
3. **Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**, yang diwujudkan melalui kegiatan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman.
4. **Meningkatnya kualitas dukungan manajemen balai**, yang dilaksanakan melalui kegiatan dukungan manajemen penyelenggaraan balai.

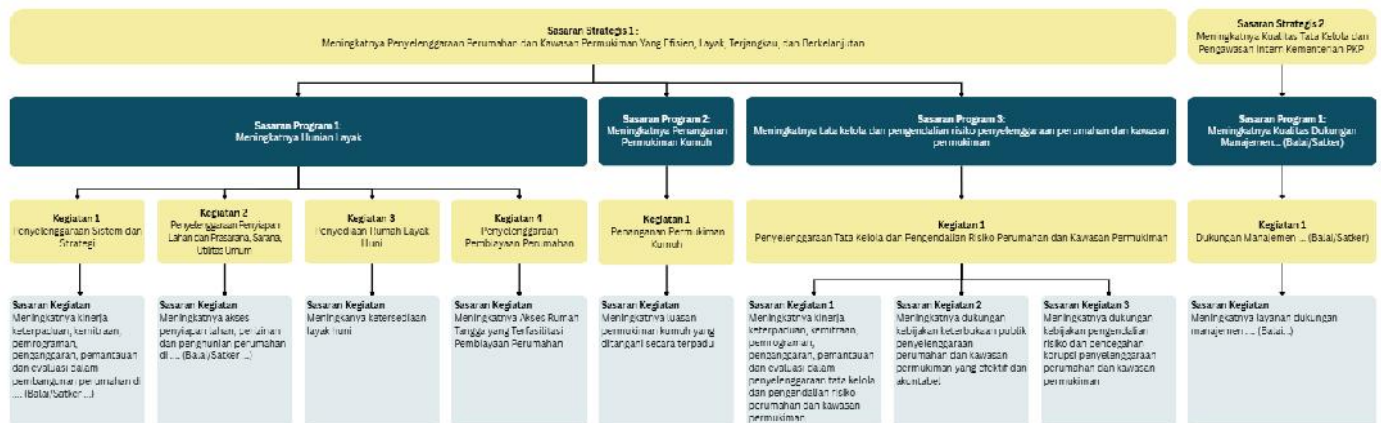
Berdasarkan Sasaran Program yang telah dijabarkan di atas, disusunlah kegiatan, sasaran kegiatan BP3KP Jawa I Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan BP3KP Jawa I

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Meningkatnya hunian layak	Penyelenggaraan sistem dan strategi	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Jawa I
	Penyelenggaraan penyiapan lahan dan prasarana, sarana, utilitas umum	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di BP3KP Jawa I
	Penyediaan rumah layak huni	Meningkatnya ketersediaan layak huni
	Penyelenggaraan pembiayaan perumahan	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan
Meningkatnya penanganan permukiman kumuh	Penanganan permukiman kumuh	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko	Penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	risiko perumahan dan kawasan permukiman	kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman
		Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
		Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan
Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Jawa I	Dukungan manajemen penyelenggaraan BP3KP Jawa I	Meningkatnya layanan dukungan manajemen BP3KP Jawa I

Berikut adalah pohon kinerja Sasaran Program BP3KP Jawa I yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman:



Gambar 2. 1 Pohon Kinerja Sasaran Program BP3KP Jawa I

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus pada penguatan peran dan fungsi masing-masing unit dalam mendukung pencapaian tujuan kementerian. Penjabaran arah kebijakan ini menekankan prioritas kebijakan dan strategi pendekatan dalam rangka penguatan kinerja, guna memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan secara efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dengan strategi:
 - Percepatan pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada hunian tapak dan vertikal.
- b. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi:
 - Optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif;
 - Pengembangan klinik perumahan untuk peningkatan kapasitas pemangku kepentingan; dan
 - Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- c. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu melalui pendampingan dan penguatan pemerintah daerah dalam penyusunan instrumen perencanaan serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur permukiman.
- d. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dengan strategi:
 - Penyusunan dan harmonisasi regulasi;
 - Penguatan kolaborasi dan kelembagaan;
 - Peningkatan pendataan serta monitoring dan evaluasi;
 - Pembinaan pelaku usaha dan perlindungan konsumen;
 - Pembinaan teknis kepada pemangku kepentingan; dan
 - Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - Percepatan pembangunan rumah baru;
 - Perluasan peningkatan kualitas rumah;
 - Penyediaan PSU perdesaan;
 - Pengembangan model perumahan terintegrasi; dan
 - Fasilitasi penyediaan lahan tanpa mengurangi lahan produktif.
- b. Mendorong penyediaan rumah melalui skema pembiayaan inovatif, dengan strategi:

-
- Kerja sama dengan lembaga keuangan mikro;
 - Pengembangan tabungan berencana;
 - Bantuan terintegrasi dengan pembangunan desa;
 - Pengembangan KRR dan KBR;
 - Kerja sama dengan koperasi; dan
 - Peningkatan subsidi pembiayaan.
- c. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi, dan pola koordinasi, dengan strategi:
- Harmonisasi regulasi perdesaan;
 - Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) penyiapan lahan dan perizinan;
 - NSPK pembiayaan;
 - NSPK pembangunan dan peningkatan kualitas;
 - Panduan pembinaan teknis;
 - Panduan monitoring dan evaluasi; dan
 - Diversifikasi model perumahan.
- d. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan, dengan strategi:
- Penguatan sinergi pusat dan daerah;
 - Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan;
 - Harmonisasi perencanaan;
 - Penguatan koordinasi; dan
 - Penguatan kelembagaan.

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
- Percepatan pembangunan rumah baru;
 - Perluasan peningkatan kualitas rumah;
 - Penyediaan PSU perkotaan; dan
 - Pengembangan model perumahan terintegrasi.
- b. Optimalisasi pemanfaatan lahan negara/daerah/BUMN dan pengembangan perumahan vertikal melalui skema KPB dan pendekatan kawasan terpadu.
- c. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD).
- d. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan, dengan strategi:
- Penguatan sinergi multipihak;
 - Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan;
 - Harmonisasi perencanaan pusat dan daerah;
 - Penguatan koordinasi; dan
 - Penguatan kelembagaan.
- e. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antarlevel pemerintahan.
- f. Pengembangan skema pembiayaan berbasis kebutuhan MBR.
- g. Penerapan teknologi konstruksi dan penguatan sistem informasi digital.
- h. Percepatan penghunian melalui revitalisasi dan penguatan pengelolaan rusun.

3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR)

- a. Penguatan pengawasan bantuan perumahan bagi MBR dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
- b. Peningkatan tata kelola hunian publik dan privat vertikal melalui penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).
- c. Diversifikasi sumber pembiayaan perumahan dan penguatan tata kelola pembiayaan, dengan strategi:
 - Implementasi Tapera dan pendanaan multilateral;
 - Koordinasi dengan Bank Indonesia;
 - Optimalisasi DTSEN dan antrean perumahan; dan
 - Penguatan regulasi teknis.
- d. Penguatan regulasi mekanisme kemitraan.
- e. Peningkatan kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- f. Penguatan ekosistem perumahan yang inklusif dan berkelanjutan melalui aspek *governance, risk, compliance, financing*, dan CSR.

3.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan dalam mendukung keberhasilan program melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan difokuskan pada:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Transformasi digital dan tata kelola;
- c. Penguatan sumber daya manusia;
- d. Penguatan sistem informasi dan data;
- e. Peningkatan layanan dukungan manajemen;
- f. Percepatan regulasi dan advokasi hukum;
- g. Modernisasi pengelolaan keuangan dan BMN;
- h. Penguatan sistem pengadaan barang/jasa;
- i. Penguatan komunikasi publik; dan
- j. Kolaborasi dan pendanaan alternatif.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi unit organisasi yang telah dijabarkan sebelumnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di daerah menyusun arah kebijakan dan strategi yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, serta karakteristik wilayah kerja. Arah kebijakan dan strategi ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan program antara unit pusat dan balai dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian.

Arah kebijakan dan strategi BP3KP Jawa I difokuskan pada pelaksanaan, fasilitasi, pendampingan teknis, serta pengawasan program perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja. Fokus tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hunian, penanganan permukiman kumuh, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan perumahan. Arah kebijakan dan strategi tersebut dilaksanakan melalui:

1. Peningkatan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman, yang dilaksanakan melalui strategi:

-
- a. Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kualitas rumah bagi MBR;
 - b. Supervisi teknis penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman; dan
 - c. Dukungan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh secara terpadu.
2. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi program pusat dan daerah, yang dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program perumahan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Fasilitasi sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pusat dan daerah; dan
 - c. Penguatan kerja sama dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja.
 3. Peningkatan kualitas pendampingan teknis dan pengelolaan data yang dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kepada pemerintah daerah;
 - b. Pendampingan penyusunan dokumen teknis, perencanaan, dan pelaporan;
 - c. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah di bidang perumahan dan permukiman; dan
 - d. Penguatan sistem pendataan dan penerapan standar teknis perumahan.
 4. Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan program yang dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala di lapangan;
 - b. Verifikasi dan validasi data program perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Penyusunan laporan kinerja dan pelaksanaan program secara akuntabel; dan
 - d. Pemanfaatan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman.
 5. Penguatan tata kelola, pengendalian risiko, dan integritas organisasi yang dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Dukungan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko;
 - c. Penguatan pengendalian internal; dan
 - d. Dukungan pembangunan zona integritas.
 6. Peningkatan dukungan manajemen dan sumber daya organisasi yang dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia balai;
 - c. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara; dan
 - d. Penguatan layanan administrasi serta sarana dan prasarana pendukung.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan tujuan pembentukan, struktur organisasi, tata laksana (alur kerja) dan pengelolaan sumber daya masyarakat (kualitas dan kuantitas) yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, serta memastikan sinkronisasi dengan unit lain baik internal maupun eksternal. Pemerintah melakukan transformasi kelembagaan yang signifikan, yaitu perubahan dari Direktorat Jenderal Perumahan, bagian dari perumahan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi satu entitas tersendiri, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dijelaskan dalam

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.3.1 Tujuan Pembentukan BP3KP Jawa I

Pembentukan BP3KP dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat wilayah. BP3KP Jawa I dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan teknis penunjang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten.

Dalam kerangka pencapaian visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP Jawa I mendukung terwujudnya sasaran strategis pembangunan perumahan nasional, yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Keberadaan BP3KP Jawa I diharapkan mampu memperkuat koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan kepada pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

3.3.2 Tugas dan Fungsi BP3KP Jawa I

BP3KP Jawa I mempunyai tugas melaksanakan pembangunan perumahan serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah I yaitu Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan di wilayah II yaitu Provinsi Banten. Dalam melaksanakan tugas, BP3KP Jawa I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan Kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

-
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
 - o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

3.3.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi sebagai BP3KP Kelas I sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025, BP3KP Jawa I memiliki susunan organisasi yang terdiri atas Kepala Balai, Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksana Wilayah I, Seksi Pelaksana Wilayah II, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Susunan organisasi dan tugas masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Balai

Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi BP3KP di wilayah kerja Jawa I yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten.

2. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, pelaksanaan komunikasi publik, serta pemberian layanan hukum balai.

3. Seksi Pelaksana Wilayah I

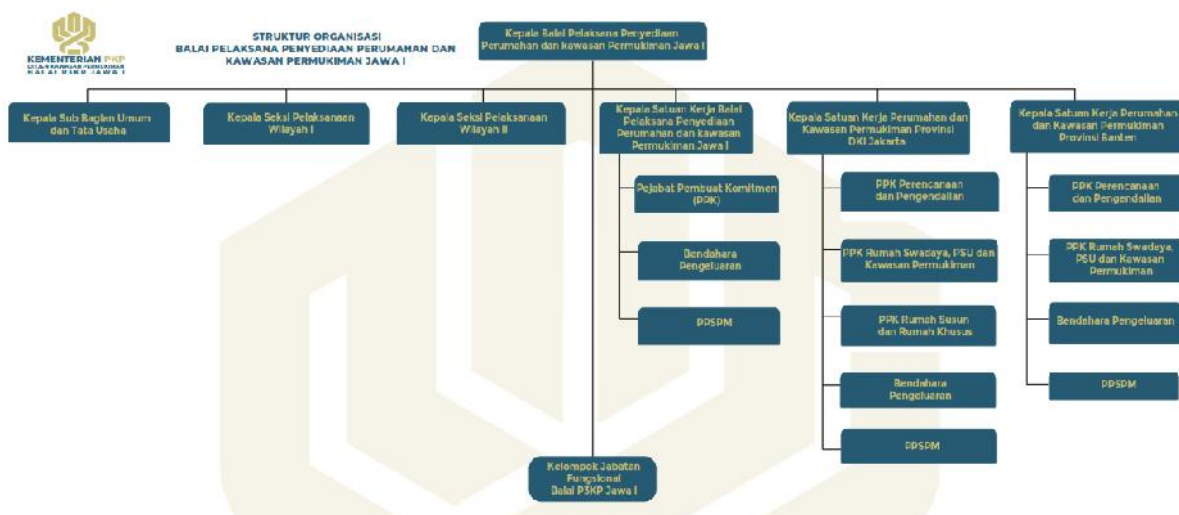
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta verifikasi data pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Seksi Pelaksana Wilayah II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta verifikasi data pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir di Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BP3KP Jawa I

BP3KP merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan tugas penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan dan penataan kawasan permukiman, penanganan kawasan pasca bencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung oleh 19 (sembilan belas) BP3KP yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Berikut ini adalah struktur organisasi BP3KP:



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi BP3KP

3.3.4 Struktur Koordinasi BP3KP

BP3KP secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Meskipun demikian, BP3KP memiliki jalur koordinasi dengan unit kerja pusat lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Keempat instansi tersebut memiliki hubungan koordinatif, ditunjukkan dengan garis putus-putus. BP3KP memiliki beberapa unit kerja di bawahnya, salah satunya adalah subbagian umum dan tata usaha yang menangani tugas administratif dan kesekretariatan. Selain itu, terdapat dua seksi teknis yang membawahi pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja masing-masing, yaitu Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Seksi Pelaksanaan

Wilayah II. Kedua seksi ini menjalankan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan.

Dibawah struktur tersebut juga terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jabatan ini memiliki peran penting dalam operasionalisasi tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab balai. Secara keseluruhan, struktur ini menggambarkan sistem koordinasi dan komando yang terintegrasi antara tingkat pusat dan pelaksana teknis di daerah untuk memastikan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan secara efisien dan efektif. Berikut ini adalah struktur koordinasi pada BP3KP:

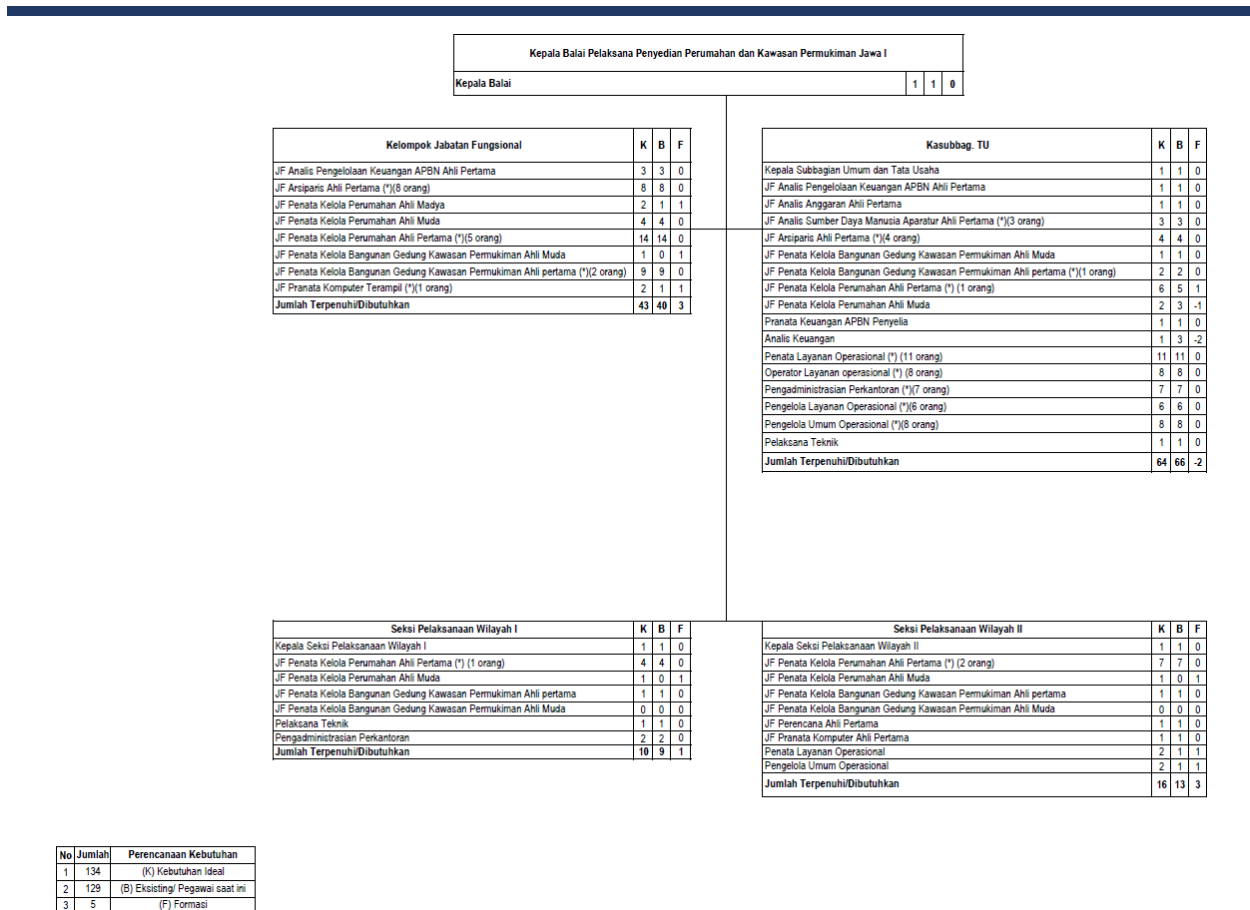


Gambar 3. 3 Struktur Koordinasi BP3KP

3.3.5 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara organisasi, BP3KP Jawa I membawahi 2 (dua) wilayah satuan kerja (satker), yaitu Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh kelompok jabatan fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP3KP Jawa I didukung oleh SDM sebanyak 129 pegawai yang tersebar pada unit kerja BP3KP Jawa I sebanyak 88 orang, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha sebanyak 66 orang, Seksi Wilayah I sebanyak 9 orang, dan Seksi Wilayah II sebanyak 13 orang, serta Satker sebanyak 41 orang yang merupakan kelompok jabatan fungsional.

Ketersediaan sumber daya manusia tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Jawa I. Oleh karena itu, untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan pegawai, dilakukan analisis kebutuhan SDM berdasarkan peta jabatan guna mengetahui kondisi eksisting, kebutuhan ideal, serta kesenjangan kepegawaian yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pengelolaan SDM ke depan.



Gambar 3. 4 Peta Jabatan BP3KP Jawa I

Berdasarkan Peta Jabatan BP3KP Jawa I, kebutuhan ideal SDM tercatat sebanyak 134 pegawai, sedangkan jumlah pegawai yang tersedia saat ini sebanyak 129 pegawai, sehingga masih terdapat kekurangan formasi sebanyak 5 pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan SDM telah mencapai sekitar 96 persen dari kebutuhan ideal, sehingga secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi masih dapat berjalan dengan baik. SDM tersebut tersebar pada unit kerja BP3KP Jawa I yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelaksanaan Wilayah I, Seksi Pelaksanaan Wilayah II, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administrasi organisasi.

Berdasarkan distribusi unit kerja, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kebutuhan ideal sebanyak 43 pegawai dengan kondisi eksisting 41 pegawai, sehingga masih terdapat kekurangan 2 pegawai. Pada Subbagian Tata Usaha terdapat kebutuhan ideal sebanyak 64 pegawai, sementara jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 66 pegawai, sehingga terdapat kelebihan 2 pegawai dibandingkan kebutuhan ideal. Sementara itu pada unit pelaksana teknis wilayah, Seksi Pelaksanaan Wilayah I memiliki kebutuhan ideal 10 pegawai dengan kondisi eksisting 9 pegawai (kekurangan 1 pegawai), sedangkan Seksi Pelaksanaan Wilayah II memiliki kebutuhan ideal 16 pegawai dengan kondisi eksisting 13 pegawai (kekurangan 3 pegawai). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan penguatan SDM terutama terdapat pada jabatan fungsional teknis serta unit pelaksana wilayah yang berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Jawa I.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan SDM BP3KP Jawa I ke depan masih menghadapi beberapa tantangan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional teknis serta unit pelaksana wilayah yang memiliki peran

strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan penataan dan optimalisasi distribusi pegawai antar unit kerja guna memastikan keseimbangan beban kerja serta efektivitas pelaksanaan tugas organisasi. Dalam jangka menengah, penguatan kapasitas SDM juga menjadi faktor penting melalui peningkatan kompetensi, pengembangan jabatan fungsional, serta peningkatan kualitas manajemen SDM. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi BP3KP Jawa I dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerjanya.

Berdasarkan analisis kondisi eksisting SDM BP3KP Jawa I, pengelolaan SDM ke depan menghadapi beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai Peta Jabatan
Ketersediaan pegawai BP3KP Jawa I saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal organisasi sebagaimana tercantum dalam peta jabatan. Kekurangan pegawai terdapat pada unit pelaksana wilayah dan kelompok jabatan fungsional yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Jawa I.
2. Optimalisasi distribusi sumber daya manusia antar unit kerja
Distribusi pegawai antar unit kerja belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja masing-masing unit. Kondisi ini memerlukan penataan dan optimalisasi distribusi pegawai agar pemanfaatan sumber daya manusia dapat lebih efektif dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
3. Penguatan peran jabatan fungsional dalam mendukung pelaksanaan tugas substantif
Jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan, pendampingan, serta pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, penguatan jumlah serta peran jabatan fungsional menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas teknis organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia
Perkembangan kebijakan serta meningkatnya kompleksitas pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menuntut peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, baik dari aspek teknis maupun manajerial. Upaya peningkatan kompetensi tersebut diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas BP3KP Jawa I serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I menetapkan program dan kegiatan yang berorientasi pada penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, penanganan kawasan permukiman kumuh, serta fasilitasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada periode 2025–2029 dengan dilengkapi target fisik, target layanan, dan indikator kinerja sebagai dasar evaluasi capaian pelaksanaan.

BP3KP Jawa I berperan sebagai unit pelaksana teknis di wilayah kerja dalam mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu pembangunan 10 juta unit rumah selama periode 2025–2029. Target tersebut menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja, penetapan prioritas kegiatan, pengalokasian anggaran, serta pengelolaan sumber daya balai secara efektif, terukur, dan akuntabel guna memastikan ketercapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja. Selanjutnya, ditetapkan target kinerja BP3KP I yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1 Target Kinerja Kegiatan BP3KP Jawa I

KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT		2025 – 2029	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			
Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat - Daerah	47	Rekomendasi Kebijakan	
	19	Dokumen	
	48	Laporan	
	1	Kegiatan	
Prasarana Bidang Prumahan dan Permukiman			
Pembangunan PSU Rumah Tapak	4.548	Unit	
Pembangunan PSU Hunian Vertikal	7.556	Unit	
Pembangunan Rumah Swadaya	81.821	Unit	
Pembangunan Rumah Khusus	5.112	Unit	
Pembangunan Rumah Susun	3.488	Unit	
Permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	35	Hektar	

KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT	2025 – 2029	
DUKUNGAN MANAJEMEN		
Layanan Perkantoran	15	Layanan
Layanan Umum	47	Layanan
Layanan Sarana Internal	15	Layanan
Layanan Data dan Informasi	12	Layanan
Layanan BMN	8	Layanan
Layanan Reformasi Kinerja	12	Layanan

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung pencapaian target fisik dan layanan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I pada Tahun Anggaran 2025–2029, diperlukan dukungan berbagai sumber daya, baik berupa sarana dan prasarana, kebijakan dan regulasi, maupun pendanaan. Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan serta kawasan permukiman sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber pendanaan kegiatan BP3KP Jawa I berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pendanaan non-APBN.

Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya disajikan kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BP3KP Jawa I. Kerangka pendanaan ini memuat alokasi anggaran per program dan kegiatan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja.

Tabel 4. 2 Kebutuhan Pendanaan Bersumber APBN Kegiatan BP3KP Jawa I Tahun 2025-2029

KEGIATAN/SASARAN/RINCIAN OUTPUT	2025 – 2029 (dalam juta rupiah)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	26.276,326
Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	11.546.810,154
DUKUNGAN MANAJEMEN	
Layanan Perkantoran	140.093,354
Layanan Umum	3.170,692
Layanan Sarana Internal	1.202,025
Layanan Data dan Informasi	438,486
Layanan BMN	385.888
Layanan Reformasi Kinerja	1.300,746

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I disusun sebagai pedoman operasional dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BP3KP Jawa I dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas hunian yang layak, merata, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target Renstra BP3KP Jawa I Tahun 2025–2029 membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, selain mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari APBN, diperlukan penguatan kemitraan dengan sektor swasta serta pemanfaatan berbagai alternatif pembiayaan. Pemerintah juga terus mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberian insentif, bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, peningkatan sanitasi, serta program bantuan stimulan perumahan swadaya guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Renstra ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, melalui penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta penguatan kepastian hukum bermukim. Pelaksanaan pembangunan perumahan dilandaskan pada prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan kawasan permukiman.

Melalui pelaksanaan Renstra BP3KP Jawa I secara konsisten serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan percepatan penyediaan perumahan dan peningkatan kualitas permukiman dapat tercapai secara optimal. Penguatan koordinasi vertikal dan horizontal menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program perumahan.

Sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pelaksanaan Renstra BP3KP Jawa I dilaksanakan melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian dan evaluasi tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, BP3KP Jawa I menerapkan berbagai instrumen penguatan tata kelola, antara lain melalui penerapan manajemen risiko, pemanfaatan sistem data dan informasi yang terintegrasi, serta pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala. Melalui mekanisme tersebut diharapkan akuntabilitas pelaksanaan program dapat terjaga, sekaligus mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfungsi untuk menilai tingkat capaian kinerja, tetapi juga menjadi

dasar bagi perbaikan kebijakan serta penyempurnaan pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis dan terbuka untuk disempurnakan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan nasional. Dengan demikian, Renstra BP3KP Jawa I diharapkan tetap relevan, adaptif, dan mampu menjadi landasan yang kuat dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

LAMPIRAN 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI P3KP JAWA I

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan																
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:																
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi															
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak																
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I																
	OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	50.000	175.000	184.450	194.410	204.908	808.769
		2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	60.000	63.240	66.655	70.254	260.149
		3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	3	-	-	-	-	3	145.789	0	0	0	0	145.789

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
		4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	32.632	34.394	36.251	38.208	141.485
		5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	102.019	0	0	0	0	102.019
		6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	294.777	310.695	327.472	345.156	1.278.100
		7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	124.539	131.264	138.352	145.823	539.979
		8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	1	2	2	2	2	9	91.074	557.121	587.206	618.915	652.336	2.506.651
		9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	175.000	184.450	194.410	204.908	758.769
		10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	3	3	3	3	12	-	280.000	295.120	311.056	327.854	1.214.030
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I																
	OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	180	1.092	1.092	1.092	1.092	4.548	1.017.829	16.005.372	16.643.036	17.408.234	18.428.496	69.502.968
		2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	1.889	1.889	1.889	1.889	7.556	-	18.888.889	20.022.222	21.155.556	22.288.889	82.355.556

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
		3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	88.900	93.701	98.760	281.361
		4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	966.451	1.018.639	1.073.646	1.131.623	4.190.359
		5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	90.000	94.860	99.982	105.381	390.224
		6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	95.000	100.130	105.537	111.236	411.903
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni																
	OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	1.461	20.090	20.090	20.090	20.090	81.821	49.674.000	486.328.675	510.587.350	534.846.025	559.104.700	2.140.540.750
		2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	1.278	1.278	1.278	1.278	5.112	-	550.747.231	567.242.373	594.192.802	621.143.232	2.333.325.638
		3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	-	864	800	912	912	3.488	-	1.626.501.443	1.518.640.000	1.809.772.800	1.888.296.000	6.843.210.243
		4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	88.500	93.279	98.316	103.625	383.720
		5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	3	-	-	-	-	3	11.108	-	-	-	-	11.108
		6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	333.095	351.082	370.041	390.023	1.444.240
		7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	246.000	259.284	273.285	288.043	1.066.612

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029
		8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	326.436	344.064	362.643	382.226	1.415.368
		9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	1	-	-	-	-	1	302.128	-	-	-	-	302.128
		10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4		95.000	100.130	105.537	111.236	411.903
		11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4		985.950	1.039.191	1.095.308	1.154.454	4.274.903
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan																
	OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	80.000	84.320	88.873	93.672	346.866
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu															
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh																
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																
	OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	15	-	20	-	35	-	31.575.000	-	46.300.000	-	77.875.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																

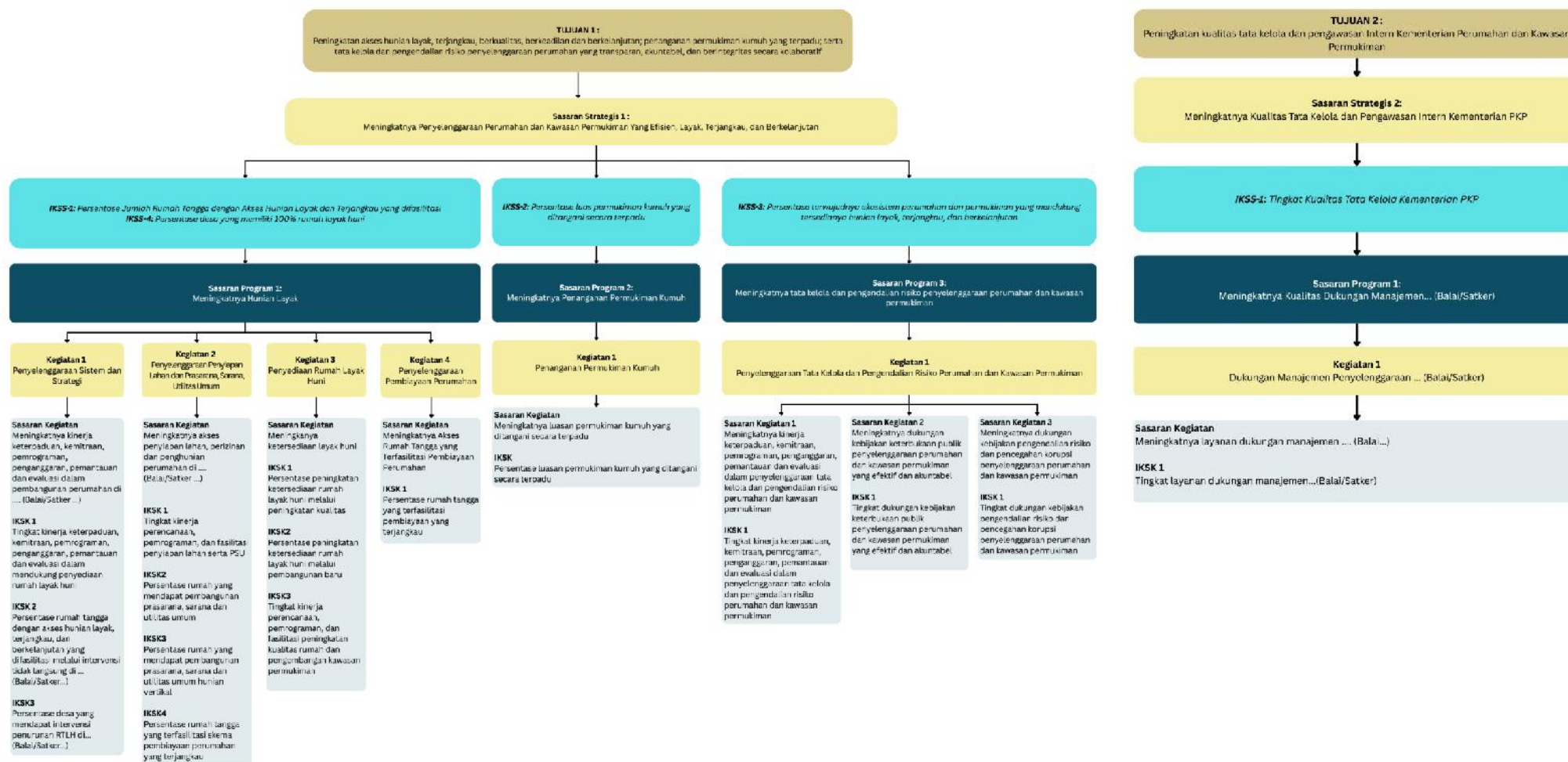
PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan													
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman														
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman														
OUTPUT KEGIATAN:														
	1 Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	52.600	75.000	100.000	125.000	352.600
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel														
OUTPUT KEGIATAN:														
	1 Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	129.232	182.150	200.365	220.410	242.451	974.608
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman														
OUTPUT KEGIATAN:														
	1 Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	174.233	225.000	247.500	272.250	299.475	1.218.458
	2 Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	225.000	247.500	272.250	299.475	1.044.225

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																	
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I																	
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I																	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I																	
	OUTPUT KEGIATAN:																
		1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)		Layanan	3	3	3	3	3	15	10.945.274	29.963.883	31.462.077	33.035.181	34.686.940	140.093.354
		2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)		Layanan	3	3	3	3	3	15	17.885	58.500	61.425	64.496	67.721	270.027
		3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)		Layanan	-	3	3	3	3	12	-	162.000	170.748	179.968	189.687	702.403
		4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)		Layanan	-	2	2	2	2	8	-	252.000	265.608	279.951	295.068	1.092.627
		5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan	-	3	3	3	3	12	-	255.000	268.770	283.284	298.581	1.105.634
		6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)		Layanan	3	3	3	3	3	15	25.775	272.904	286.549	300.876	315.920	1.202.025
		7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)		Layanan	-	1	1	1	1	4	-	12.000	12.648	13.331	14.051	52.030
		8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)		Layanan	-	1	1	1	1	4	-	14.131	14.894	15.698	16.546	61.269

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
		9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	75.000	79.050	83.319	87.818	325.187
		10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	14.000	14.756	15.553	16.393	60.702
		11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	75.000	79.050	83.319	87.818	325.187
		12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12	-	300.000	316.200	333.275	351.272	1.300.746
Total											62.686.346	2.767.191.278	2.672.301.819	3.064.882.968	3.152.615.260	11.719.677.672

LAMPIRAN 2

POHON KINERJA PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN POHON KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN



LAMPIRAN 3

METODE PERHITUNGAN BALAI P3KP JAWA I

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan									
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak									
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi									
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I	IKSK 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan			

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2028: 3 laporan 2026: 3 laporan 2029: 3 laporan 2027: 3 laporan Total: 12 laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I	IKSK 1	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 180 unit 2028: 1.092 unit 2026: 1.092 unit 2029: 1.092 unit 2027: 1.092 unit Total: 4.548 unit	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKSK 2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2028: 1.889 unit 2027: 1.889 unit 2029: 1.889 unit 2026: 1.889 unit Total: 7.556 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	OK 3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2028: 1 dokumen 2026: 0 dokumen 2029: 1 dokumen 2027: 1 dokumen Total: 3 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2028: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2027: 1 dokumen Total: 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 800 unit 2029: 912 unit 2026: 864 unit 2028: 912 unit Total: 3.488 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2028: 1 laporan 2026: 1 laporan 2029: 1 laporan 2027: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 laporan 2028: 0 laporan 2026: 0 laporan 2029: 0 laporan 2027: 0 laporan Total: 3 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2028: 1 laporan 2026: 1 laporan 2029: 1 laporan 2027: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan Dihitung dari realisasi jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2028: 1 laporan 2026: 1 laporan 2029: 1 laporan 2027: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2028: 0 laporan 2026: 0 laporan 2029: 0 laporan 2027: 0 laporan Total: 1 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan Dihitung dari realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 4: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan								
SK 1	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	IKSK 1	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau	OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh								
Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh								
SK 1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: 0 Ha 2028: 20 Ha 2026: 15 Ha 2029: 0 Ha 2027: 0 Ha Total: 35 Ha	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman								

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I mulai tahun 2026 Capaian = Realisasi laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2028: 1 laporan 2026: 1 laporan 2029: 1 laporan 2027: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	IKSK 2	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	OK 2	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan Total: 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
SK 3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 3	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Dihitung dari realisasi jumlah penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan Total: 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Dihitung dari realisasi jumlah pelaksanaan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN								

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				OK 5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2028: 3 layanan 2026: 3 layanan 2029: 3 layanan 2027: 3 layanan Total: 12 layanan		Non Kumulatif	Internal
				OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 3 layanan 2028: 3 layanan 2026: 3 layanan 2029: 3 layanan 2027: 3 layanan Total: 15 layanan		Non Kumulatif	Internal
				OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2028: 1 layanan 2026: 1 layanan 2029: 1 layanan 2027: 1 layanan Total: 4 layanan		Non Kumulatif	Internal
				OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2028: 1 layanan 2026: 1 layanan 2029: 1 layanan 2027: 1 layanan Total: 4 layanan		Non Kumulatif	Internal
				OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2028: 1 layanan 2026: 1 layanan 2029: 1 layanan 2027: 1 layanan Total: 4 layanan		Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2028: 1 layanan 2026: 1 layanan 2029: 1 layanan 2027: 1 layanan Total: 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2028: 1 layanan 2026: 1 layanan 2029: 1 layanan 2027: 1 layanann Total: 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2028: 3 layanan 2026: 3 layanan 2029: 3 layanan 2027: 3 layanan Total: 12 layanan	Non Kumulatif	Internal